

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN SIDOARJO

Navella Marchelina<sup>1</sup>, Yusuf Hariyoko<sup>2</sup>, Indah Murti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

[navellamarr@gmail.com](mailto:navellamarr@gmail.com),  
[yusufhari@untag-sby.ac.id](mailto:yusufhari@untag-sby.ac.id),  
[endah@untag-sby.ac.id](mailto:endah@untag-sby.ac.id)

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas  
Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Irigasi merupakan elemen penting dalam mendukung produktivitas pertanian, khususnya di wilayah lumbung pangan seperti Jawa Timur. Namun, kondisi infrastruktur yang belum optimal dan distribusi air yang tidak merata masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pengelolaan irigasi sudah berjalan dan memberikan dampak positif, namun masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi di lapangan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya partisipasi kelembagaan petani. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi dan mendukung ketahanan pangan daerah.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kebijakan Publik, Pengelolaan Irigasi

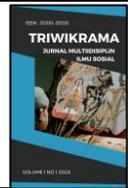
### ABSTRACT

This study aims to evaluate irrigation management policies in Sidoarjo District using William N. Dunn's policy evaluation theory which includes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. Irrigation is an important element in supporting agricultural productivity, especially in food barn areas such as East Java. However, suboptimal infrastructure conditions and uneven water distribution are still major obstacles. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that although the irrigation management system has been running and has a positive impact, there are still various obstacles in the implementation in the field, such as limited facilities, lack of coordination between agencies, and low institutional participation of farmers. This study recommends infrastructure improvement, institutional strengthening, and increased cross-sector coordination as strategic steps to improve irrigation management performance and support regional food security.

**Keywords:** Evaluation, Public policy, irrigation management

\*Corresponding author

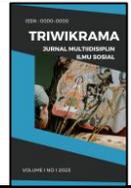
E-mail addresses: [navellamarr@gmail.com](mailto:navellamarr@gmail.com)



## 1. PENDAHULUAN

Irigasi menjadi pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan merupakan kebijakan Pemerintah yang sangat strategis dalam pertumbuhan perekonomian nasional guna mempertahankan produksi swasembada beras. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi pada ketentuan umum bab I pasal 1 berbunyi irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. Untuk mengalirkan air sampai pada area persawahan diperlukan jaringan irigasi, dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh sebab itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Sebagaimana diketahui bahwa irigasi memiliki peran penting sebagai kunci dalam meningkatkan produktivitas dalam pertanian (Kaya et al., 2015). Menurut penelitian dari (Lankford & Orr, 2022; Sukri et al., 2020) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas air pada tanaman pertanian melalui pemanfaatan air irigasi dengan sistem pengelolaan yang baik. Dalam hal ini dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan optimal. Dikutip dari (Direktoral Jenderal Sumber Daya Air, 2023) Pada tahun 2023, pemerintah provinsi dan kabupaten kota melaporkan sebagian jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan perlu segera di rehabilitasi karena 1,2 juta ha luas daerah irigasi tidak terlayani dengan optimal.

Menurut data dari Berita Resmi Statistik, di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan irigasi menjadi sangat penting mengingat provinsi ini merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Dengan luas lahan pertanian yang mencapai lebih dari 1,5 juta hektar, irigasi yang efisien sangat diperlukan untuk mendukung produksi padi dan komoditas pertanian lainnya. Berdasarkan data BPS tahun-tahun terakhir, Jawa Timur menempati posisi pertama besar sebagai provinsi dengan kontribusi tertinggi terhadap produksi padi nasional, sehingga keberhasilan pengelolaan irigasi di provinsi ini sangat memengaruhi ketahanan pangan secara nasional. Pemilihan Jawa Timur, khususnya Kabupaten Sidoarjo, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada peran strategisnya dalam sistem pertanian nasional serta tantangan nyata yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi di tingkat daerah. Tantangan tersebut antara lain meliputi infrastruktur irigasi yang belum sepenuhnya memadai dan distribusi air yang tidak merata, yang berpotensi menghambat peningkatan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, penerapan sistem irigasi yang baik dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi kunci utama untuk memastikan keberhasilan sektor pertanian di wilayah ini, serta mendukung ketahanan pangan baik di tingkat provinsi maupun nasional.



Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Jawa Timur, merupakan kabupaten yang juga memiliki tanah yang subur untuk lahan pertanian. Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu wilayah yang dianggap sebagai lumbung padi Jawa Timur. Luas lahan pertanian Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 36.000 hektar, namun jika dibiarkan dan kurang dimanfaatkan maka hanya sekitar 22.000 hektar saja yang akan aktif ditanami, dan sebagian lainnya tidak digarap (Syairwan, 2017:54 dalam Widia, 2019). Tengah menghadapi masalah serius terkait kerusakan sistem irigasi. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi saluran irigasi yang tidak berfungsi secara maksimal, tersumbat, atau bahkan belum tersedia di beberapa kawasan pertanian. Kondisi ini mengakibatkan distribusi air yang tidak merata dan menurunkan produktivitas lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi terhadap pembangunan dan pengelolaan irigasi yang telah dilaksanakan, guna mengetahui sejauh mana efektivitas program tersebut dalam meningkatkan produktivitas usaha tani di Kabupaten Sidoarjo.

Melihat fakta permasalahan yang ada, pengelolaan irigasi menjadi salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan produktivitas padi, terutama di daerah yang sangat membutuhkan. Pengelolaan irigasi yang efektif harus mempertimbangkan kondisi dan situasi terkini di desa, serta mengidentifikasi kebutuhan yang dianggap lebih mendesak untuk diutamakan. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan irigasi harus dimanfaatkan secara optimal, dengan fokus pada manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengevaluasi pengelolaan irigasi sebagai upaya meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan irigasi yang diterapkan saat ini dan dampaknya terhadap hasil pertanian yang dirasakan oleh para petani. Dengan demikian, penulis memilih judul "Evaluasi kebijakan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Sidoarjo" dan menggunakan Teori Evaluasi menurut William N. Dunn sebagai landasan dalam penelitian ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan irigasi dan peningkatan produktivitas padi di daerah tersebut.



## TINJAUAN PUSTAKA

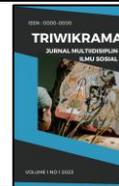
Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1976). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks karena selain melibatkan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi juga melibatkan berbagai dimensi yang ditujukan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan menurut Patton dan Sawicki, mengemukakan empat dimensi pokok dalam evaluasi kebijakan yakni. Technical feasibility, political viability, economic and financial possibility. And administrative operability. Penjelasan mengenai dimensi evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. Kelayakan Teknis (Technical Feasibility), mengukur apakah kebijakan atau hasil dari sebuah program berhasil dua kriteria utama yang termasuk dalam kategori ini adalah efektivitas dan kecukupan. Menyangkut penyediaan informasi yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program sehingga dapat diramalkan tentang kemungkinan pencapaian tujuannya. Pada konteks ini terdapat dua ukuran yakni efektivitas program adalah kemampuan tercapainya tujuan kebijakan dan adequacy adalah kemungkinan solusi pemecahan berdasarkan ketersediaan sumberdaya.
2. Peluang Ekonomi dan Finansial (Economic and Financial Possibility), pengukurannya mencakup biaya program dan keuntungan yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan penilaian tingkat efisiensi suatu program. Program yang efisien adalah program yang dapat mampu memberikan benefit atau memberikan hasil yang memadai ditinjau dari segi biaya dan keuntungan dari program tersebut.
3. Daya dukung Politis (Political Viability), Kebijakan dibangun dalam arena politik karenanya harus cukup mendapatkan dukungan dari proses politik. Sebagai konsekuensinya, alternatif kebijakan selanjutnya berfokus pada nilai-nilai atau penilaian secara politis. Ukuran politis dalam hal ini berkaitan dengan didukungnya kebijakan oleh para pembuat keputusan (decision makers), para pejabat publik, masyarakat, dan lain-lain sumber kekuasaan dalam proses perpolitikan.
4. Daya dukung Administratif (Administrative Operability), meliputi mengenai seberapa mungkin program program dilaksanakan sesuai kebijakan yang ada. Ukurannya antara lain adalah otoritas, komitmen institusi, kapabilitas staf dan kapasitas finansial serta dukungan organisasi menyangkut fasilitas fisik dan lainlain dukungan yang memungkinkan terwujudnya pelayanan.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode ini penulis dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Penelitian ini memberika gambaran kenyataan dari kejadian yang diteliti. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai berikut :

1. Data primer



Data primer merupakan data yang akan diperoleh secara langsung dari informan penelitian yang berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan cara melakukan wawancara (*Interview*) kepada narasumber yang ada di Dinas Pekerja Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Penulis telah melakukan wawancara dengan 5 narasumber yang terdiri dari petani, pengelola irigasi, dan pihak terkait lainnya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tersedia, sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. Misalnya diperpustakaan, biro pusat statistic dan kantor pemerintah atau dengan kata lain suatu data yang bersumber dari bahan bacaan seperti buku atau jurnal. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh berupa data- data dari kearsipan Dinas Pekerja Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pangan dan Pertanian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan langsung terlibat di objek yang menjadi fokus penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi

## 4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam melakukan penelitian, karena analisis data merupakan tahapan untuk memecahkan permasalahan yang ada dan juga untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan data.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Pembahasan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Sidoarjo. Upaya dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang terdiri dari enam indikator utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan irigasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memanfaatkan sumber daya secara optimal, menjawab kebutuhan petani, memberikan pelayanan yang adil, serta tepat sasaran.

#### a) Efektivitas (*Effectiveness*)

Indikator yang pertama yaitu efektivitas (*effectiveness*), di mana dalam indikator ini berkaitan dengan sejauh mana kebijakan pengelolaan irigasi yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menjadi penting dalam menilai keberhasilan sebuah kebijakan publik, khususnya pada bidang pengelolaan irigasi, karena hal ini menunjukkan apakah kebijakan yang telah dirancang dan diterapkan mampu memberikan dampak yang nyata dan sesuai dengan harapan. Kebijakan pengelolaan irigasi yang diterapkan di Kabupaten Sidoarjo memiliki tujuan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi air ke lahan pertanian, sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat. Akan tetapi, sebagian besar jaringan irigasi yang ada tidak



berada di bawah kewenangan langsung Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melainkan dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur.

Bagi masyarakat, khususnya para petani sebagai pihak penerima manfaat dari kebijakan ini, efektivitas kebijakan sangat terasa terutama saat musim tanam dan musim kemarau. Beberapa petani seperti yang berasal dari Desa Tarik mengungkapkan bahwa pengelolaan air melalui sistem giliran cukup berjalan, namun tidak semua sawah mendapatkan jatah air secara merata. Akibatnya, petani harus mengandalkan pompa diesel pribadi sebagai alternatif ketika aliran irigasi tidak mencukupi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan secara administratif dinyatakan berjalan, namun belum menjamin kontinuitas pasokan air secara merata di lapangan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan efektivitas distribusi air secara menyeluruh.

#### b) Efisiensi

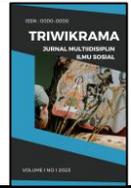
Indikator yang ketiga yaitu efisiensi (efficiency), di mana dalam indikator ini berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal dalam pelaksanaan kebijakan. Efisiensi menilai apakah kebijakan yang dijalankan mampu menghasilkan manfaat yang maksimal dengan penggunaan anggaran, tenaga kerja, dan sarana prasarana yang minimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Sidoarjo telah berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Meskipun demikian, di lapangan masih ditemukan sejumlah hambatan seperti keterbatasan alat, tenaga operasional, serta kondisi saluran yang belum seluruhnya berfungsi baik. Pengelolaan irigasi yang efisien mencakup dua hal utama, yaitu optimalisasi kebijakan dan pemanfaatan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat yang cukup baik namun belum maksimal. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya optimalisasi, seperti penggunaan alat berat dan pemberian bantuan pertanian, namun tantangan di lapangan masih cukup besar, terutama terkait keterbatasan teknologi, tenaga kerja, dan kondisi fisik saluran irigasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi, perlu adanya perbaikan infrastruktur, pemeliharaan saluran secara rutin, serta peningkatan koordinasi antara dinas terkait agar pemanfaatan sumber daya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

#### c) Kecukupan

Dalam suatu kebijakan publik, penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Hal ini berlaku pula dalam kebijakan pengelolaan irigasi, di mana salah satu tolak ukur keberhasilannya adalah apakah kebijakan tersebut mampu mencukupi kebutuhan air bagi lahan pertanian secara memadai. Kecukupan tidak hanya berbicara tentang tersedianya air, tetapi juga menyangkut sejauh mana air tersebut dapat didistribusikan ke seluruh area pertanian dengan merata dan berkelanjutan.

Hasil penelitian di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa aspek kecukupan dalam pengelolaan irigasi masih menghadapi tantangan. Infrastruktur irigasi yang ada sebagian besar merupakan peninggalan lama yang secara kapasitas dulu mampu mengairi lebih dari 30.000 Ha lahan. Namun, seiring waktu dan perubahan kondisi, kemampuan sistem tersebut mulai menurun. Debit air dari Sungai Brantas sebagai sumber utama menjadi sangat terbatas saat musim kemarau, dan distribusi air juga dipengaruhi oleh



sistem pengendalian banjir yang terintegrasi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pasokan air ke beberapa wilayah, terutama yang letaknya jauh dari saluran utama.

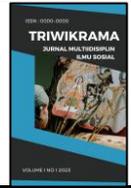
d) **Pemerataan**

Pemerataan merupakan indikator keempat dalam teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yang menekankan pada pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat kebijakan kepada seluruh kelompok sasaran. Dalam konteks pengelolaan irigasi, pemerataan berarti bahwa seluruh petani, baik yang berada di wilayah hulu maupun hilir, memiliki akses yang sama terhadap air irigasi dan bantuan sarana pendukung lainnya. Jika ada ketimpangan distribusi atau perbedaan perlakuan, maka kebijakan yang ada belum bisa dikatakan merata. Pemerataan bukan hanya soal jumlah air yang diterima, tetapi juga meliputi akses terhadap informasi, fasilitas seperti pompa air, serta keterlibatan petani dalam pengambilan keputusan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrul, ST., M.PSDA selaku Fungsional Pengelola Sumber Daya Air di Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa sistem pembagian air mengacu pada Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) yang disusun oleh dinas bersama petugas lapangan. Meskipun penentuan jadwal air tidak langsung melibatkan petani, sosialisasi tetap dilakukan agar petani mengetahui giliran air di wilayah masing-masing. Untuk daerah-daerah yang sulit mendapatkan air—terutama yang berada di hilir atau jauh dari saluran utama—dinas menerapkan sistem pengairan bergilir. Selain itu, bantuan berupa pompa air dan bahan bakar juga diberikan melalui kerja sama dengan Dinas Pertanian atau pihak terkait lainnya. Namun demikian, Bapak Fahrul juga menyampaikan bahwa peran HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air), yang seharusnya ikut mengatur di lapangan, saat ini nyaris tidak aktif, sehingga koordinasi teknis menjadi lebih berat dan berisiko menimbulkan ketimpangan. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Sidoarjo telah berupaya mewujudkan pemerataan melalui sistem pengairan bergilir dan bantuan sarana teknis, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Ketimpangan masih dirasakan oleh petani yang berada jauh dari saluran utama atau yang tidak memiliki kemampuan lebih untuk menyewa alat bantu

e) **Responsivitas**

Responsivitas merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yang mengukur sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan, keluhan, serta aspirasi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan irigasi di Kabupaten Sidoarjo, responsivitas ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh petani terkait ketersediaan dan kelancaran aliran air. Respons dari masyarakat juga terlihat dalam wawancara bersama Ibu Sarinah, petani dari Desa Mbutlegi, yang menyampaikan bahwa para petani sering menyampaikan keluhan, terutama saat saluran irigasi tersumbat atau air tidak lancar. Keluhan biasanya disampaikan ke kelompok tani atau pemerintah desa, dan umumnya ditanggapi meskipun tidak selalu cepat. Ibu Sarinah menyebutkan bahwa desa sudah berusaha membantu dengan menyediakan pompa diesel untuk menyedot air, namun karena alat terbatas, penggunaannya tetap harus bergiliran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa cukup tanggap, kapasitas alat yang terbatas masih menjadi kendala yang perlu direspons melalui kebijakan lanjutan yang lebih mendukung.



Dari sisi Dinas Pertanian, respon terhadap keluhan masyarakat juga dilakukan melalui berbagai cara, baik secara digital maupun tatap muka. Petugas menyebarkan survei online melalui WhatsApp dan media sosial, serta menjaring masukan secara langsung dalam kegiatan penyuluhan di lapangan. Menurut perwakilan Dinas Pertanian, komunikasi langsung menjadi sarana yang efektif karena keluhan dapat ditindaklanjuti saat itu juga. Semua masukan kemudian direkap untuk dijadikan dasar dalam evaluasi dan perumusan program kerja. Hal ini mencerminkan bahwa responsivitas kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya hadir dalam bentuk tanggapan, tetapi juga diupayakan menjadi bagian dari siklus perbaikan yang berkelanjutan. Namun, keterbatasan sumber daya tetap menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui peningkatan dukungan sarana dan optimalisasi koordinasi lintas sektor.

f) Ketepatan

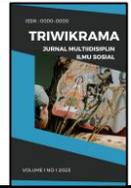
Ketepatan merupakan salah satu indikator penting dalam teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yang menekankan pada kesesuaian waktu antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam pengelolaan irigasi, ketepatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertanian, karena pasokan air harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman, khususnya padi. Jika air tidak tersedia sesuai jadwal, maka petani akan mengalami keterlambatan dalam mengolah lahan, yang dapat berdampak pada produktivitas panen. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan irigasi yang tepat waktu menjadi salah satu tolak ukur penting dalam menilai apakah sebuah kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Ketepatan dalam pengelolaan irigasi di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan cukup baik dari sisi perencanaan maupun koordinasi, namun masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Masih adanya keterlambatan distribusi air, terbatasnya fasilitas, serta kondisi teknis lapangan menjadi faktor-faktor yang menghambat ketepatan aliran irigasi. Oleh karena itu, untuk mencapai ketepatan yang lebih ideal, diperlukan peningkatan sarana pendukung, pengawasan langsung di lapangan, serta penyesuaian jadwal yang realistis dan berbasis kondisi nyata. Dengan begitu, kebijakan pengelolaan irigasi tidak hanya tepat di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani secara langsung.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Sidoarjo secara umum telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, khususnya dalam distribusi air ke lahan pertanian. Berdasarkan evaluasi menggunakan enam indikator dari teori William N. Dunn, ditemukan bahwa:

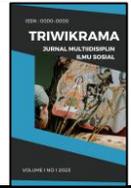
- a) Efektivitas: Sistem irigasi telah berfungsi sesuai tujuan.
- b) Efisiensi: Masih terjadi pemborosan sumber daya, terutama dalam penggunaan pompa diesel oleh petani.
- c) Kecukupan: Kebutuhan air sebagian besar terpenuhi, tetapi belum merata ke seluruh wilayah.
- d) Pemerataan: Akses terhadap sarana irigasi belum setara di semua kelompok tani.
- e) Responsivitas: Pemerintah cukup tanggap, namun tindak lanjut terhadap laporan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- f) Ketepatan: Perencanaan distribusi air sudah ada, namun pelaksanaannya masih terkendala teknis.



Secara keseluruhan, kebijakan ini perlu ditingkatkan melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kelembagaan petani, serta penyediaan sarana pendukung agar lebih merata, efisien, dan tepat sasaran. Agar kebijakan pengelolaan irigasi di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan lebih optimal, diperlukan berbagai upaya perbaikan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur irigasi melalui perbaikan dan pemeliharaan saluran air, terutama di wilayah yang jauh dari saluran utama. Penambahan sarana pendukung seperti pompa air juga penting untuk menjamin kelancaran distribusi air, khususnya di daerah yang masih bergantung pada pompa diesel pribadi. Selain itu, penguatan peran kelembagaan petani seperti HIPPA dan kelompok tani harus dilakukan untuk mendukung pengawasan, distribusi air, serta memperlancar komunikasi antara petani dan instansi terkait. Koordinasi antarinstansi, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan pemerintah desa, perlu ditingkatkan agar penanganan teknis dan penjadwalan pengairan dapat berjalan lebih terintegrasi. Akses informasi kepada petani terkait jadwal irigasi juga perlu diperluas, disertai peningkatan pengawasan lapangan agar distribusi air sesuai rencana. Respons terhadap pengaduan masyarakat harus lebih cepat dan merata, didukung oleh sistem tindak lanjut yang jelas. Terakhir, evaluasi terhadap kebijakan irigasi sebaiknya dilakukan secara berkala dengan melibatkan petani, agar kebijakan yang diterapkan benar-benar relevan dan efektif di lapangan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustyan, P. E., & Sabilla, A. A. (2021). Pengelolaan Saluran Irigasi Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Jubel Kidul. *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 113–120. <https://doi.org/10.29303/rengganis.v1i2.88>
- Anderson, J. E. (1976). *Public Policy Making*. Holt Rinechart and Winston.
- Ardelia, S. P. (2024). *Kajian Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi Tersier Daerah Irigasi Parakan Badak, Kabupaten Karawang 1. September*, 817–831.
- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Azis, S. (2011). *Analysis of Irrigation Water Requirement for Anticipating Global Climate Change*. Text Road Journals Publication.
- Darma, R., O'Connor, P., Akzar, R., Tenriawaru, A. N., & Amandaria, R. (2025). Enhancing Sustainability in Rice Farming: Institutional Responses to Floods and Droughts in Pump-Based Irrigation Systems in Wajo District, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 17(8), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su17083501>
- Daud, R., Prabowo, H., Daraba, D., Achmad, M., & Wijaya, M. (2024). *Implementation of Irrigation Management Policy in West Java Province*. 5(3), 2578–2592.
- Direktoral Jenderal Sumber Daya Air. (2023). *Laporan Data Teknis Daerah Irigasi Daerah, Kementerian PUPR*. Kementerian PUPR.
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2019). *Modul Pengenalan Sistem Irigasi: Bimbingan Teknik Pengembangan Tata Guna Air Dalam Rangka Pelatihan Teknis Instruktur PTGA*. Kementerian PUPR.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Evi, M. E., Hutajulu, J. P., & Suharyani, A. (2023). Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. *Jurnal Agristan*, 5(2), 388–398. <https://doi.org/10.37058/agristan.v5i2.9044>
- Fitriyah, L. (2021). Efektivitas dan Keberlanjutan Program Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian di Kabupaten Lamongan. *Cakrawala*, 15(1), 53–63. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.373>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan*



*Insan Akademik*, 1(3), 13–26.

Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Puspaga.

Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the Policy Cycle. In *Handbook of Public Policy Analysis Theory*. Routledge.

Kaya, Ç. I., Yazar, A., & Sezen, S. M. (2015). Saltmed model performance on simulation of soil moisture and crop yield for quinoa irrigated using different irrigation systems, irrigation strategies and water qualities in Turkey. *Agriculture and Agricultural Science Procedia*, 4, 108–118.

Kusdiane, S. D., Soetarto, E., & Sunito, S. (2018). Alih fungsi lahan dan perubahan masyarakat di kecamatan cimanuk, kabupaten pandeglang. *Journal Of Agribusiness Management*, 63, 246–251.

Lankford, B., & Orr, S. (2022). Exploring the critical role of water in regenerative agriculture; building promises and avoiding pitfalls. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, 891709.

Mulyana, A., Vidiati, C., Danarrahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., Fitra, F., Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., & Milasari, L. A. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.

Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pahlawan.

Mutiasari, M., Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1–10.

Nugrahani, F. (2008). *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar untuk Peneliti Pemula*. Pilar Media.

Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.

Rejekiningrum, P., & Kartiwa, B. (2018). Institutional Development of Irrigation Management Based on the Local Wisdom in Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 1(1), 52. <https://doi.org/10.31328/jsed.v1i1.535>

Sakina, D. (2020). Strategi pengembangan usahatani padi di Kabupaten Sumenep. *Agriscience*, 1(2), 475–486.

Salatsa, F. N., Saputri, I. D., Pujiastuti, F., Sanjaya, E. I., Mahendra, G. K., & Walinegoro, B. G. (2025). *Efektivitas Program Pembangunan Saluran Pertanian Di Kelurahan Margodadi*. 59–70.

Santoso, A. B. (2015). Pengaruh luas lahan dan pupuk bersubsidi terhadap produksi padi nasional. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 20(3), 208–212.